



Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat

Daniel Cliverson Marlissa¹, Sri Murni², Ivonne S. Saerang²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

²Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Received: 04 Januari 2021; Revised: 26 Februari 2021; Accepted: 28 April 2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.7.2.597-604.2021>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Keuangan Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota Bitung dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemda Kabupaten Tambrau sudah baik dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan pendapatan daerah itu sendiri. Hutang Pemda Kab Tambrau dinilai sudah sangat baik dalam mengontrol arus pertumbuhan utang, Ekuitas yang dimiliki masih sangat minim Pendapatan Pendapatan yang didapatkan sudah sangat mendekati dengan Anggaran yang dibuat, belanja Pemda Kabupaten Tambrau sudah berusaha cukup baik dalam mengontrol penyesuaian anggaran, surplus/defisit Pemda Kab Tambrau dinilai baik karena dalam tahun penelitian lebih sering mengalami Surplus daripada Defisit, Silpa Pemda Kab Tambrau dinilai mampu untuk menutupi defisit anggaran.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Rasio Keuangan Daerah.

Abstract

This study aims to determine the Regional Financial Performance of the Tambrau Regency Government of West Papua Province in 2016-2019.

The data analysis technique used is descriptive quantitative with the formula: Regional Financial Ratios. The results of the analysis show that the Regional Financial Performance of Bitung City is seen from (1) the Ratio of Regional Financial Independence, the Regional Government of Tambrau Regency has been good at meeting regional needs with regional income itself. The debt of the Tambrau Regency Government is considered to be very good in controlling the flow of debt growth, the equity held is still very minimal. Tambrau is considered good because in the research year it has more often experienced a surplus than a deficit, the Silpa of the Tambrau Regency Government is considered capable of covering the budget deficit.

Keywords: Performance, Government, Regional Financial Ratios.

PENDAHULUAN

Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sangat menentukan Keberhasilan otonomi daerah. Sesuai dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Kesenjangan dan Rasio pertumbuhan. (Halim, 2012).

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis kuantitatif adalah Pengumpulan data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, kemudian dilakukan perhitungan selanjutnya data hasil perhitungan atau pengukuran tersebut diproses dengan cara dianalisis. Jenis data dalam penelitian ini merupakan laporan realisasi anggaran (APBD) kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw 2017 sampai dengan tahun 2019. Data kualitatif yaitu jenis data yang di ukur secara tidak langsung dan bukan berupa angka melainkan berupa data yang diperoleh dari literature terkait. Jenis data dalam penelitian ini merupakan struktur organisasi, sejarah Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan lain-lain.

4.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, dengan mengambil data di Bupati Kabupaten Tambrauw bagian keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan selesai.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri yang bersumber dari sumber pertama atau instansi terkait ditempat penelitian dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil



wawancara dengan beberapa *key person* dan pihak terkait yaitu Bagian Ekonomi Bappeda Kabupaten Tambrauw, Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw bagian keuangan, DPPKAD Kabupaten Tambrauw, dan Pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tambrauw. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dan literatur-literaturlainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan beberapa *key person* dan pihak terkait yaitu Bagian Ekonomi Bappeda Kabupaten Tambrauw, Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw bagian keuangan, DPPKAD Kabupaten Tambrauw, dan Pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tambrauw. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dan literatur- literaturlainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan terkait bukureferensi, maupunjurnal-jurnalekonomi studi pustaka. Data ini diperoleh dari kantor Bupati Kabupaten Tambrauw berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2017-2019.

4.4 Definisi Analisis Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Dalam menentukan keuangan pemerintah daerah diperlukan alat untuk mengukurnya yaitu rasio keuangan pada APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rasio-rasio keuangan daerah tersebut antara lain:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung rasio bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman}}$$

x 100%

Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Total Penerimaan Daerah

Rasio Kemandirian

Pada Tahun 2016 Rasio Kemandirian mencapai angka 69%, masuk dalam kategori sedang dan memiliki pola hubungan Partisipatif, kemudian pada Tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dengan mencapai angka 92% dan masuk dalam kategori Tinggi serta memiliki pola hubungan Delegatif. Tahun 2017 merupakan pencapaian tertinggi Kabupaten Tambrauw dalam tahun penelitian. Pada Tahun 2018 Rasio Kemandirian Kabupaten Tambrauw mengalami penurunan pada angka 74,8% dengan kategori sedang dan memiliki pola hubungan Partisipatif dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan besar sampai pada angka 14% dengan kategori Rendah Sekali dan memiliki pola hubungan Instruktif. Dan pada Tahun 2019 yang menjadi tahun terendah dalam tahun penelitian. Jadi Rasio Kemandirian Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata 62,58% yang masuk dalam kategori sedang, itu berarti tingkat ketergantungan daerah kepada pihak lain semakin rendah atau dengan kata lain Pemda Kabupaten Tambrauw sudah baik dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan pendapatan daerah itu sendiri serta partisipasi masyarakat Kabupaten Tambrauw juga sudah dalam kategori baik dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama dalam PAD.

PENUTUP

Rasio Derajat Desentralisasi

Pada Tahun 2016 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Tambrauw memiliki angka 0,59%. Kemudian pada Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yaitu 0,47%. Tahun 2018 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 0,45% serta menjadi angka terendah dalam tahun penelitian. Tahun 2018 mengalami kenaikan kembali seperti pada tahun 2016 yaitu 0,59% yang merupakan angka tertinggi dalam tahun penelitian. Dan Derajat Desentralisasi Kabupaten Tambrauw memiliki rata-rata 0,52% yang berarti masuk dalam kategori Sangat Rendah. Jadi dari hasil data ini dapat diketahui bahwa Kabupaten



Tambrauw Provinsi Papua Barat dinilai belum mampu dalam pengadaan Desentralisasi.

Rasio Kemandirian

Pemda Kabupaten Tambrauw sudah baik dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan pendapatan daerah itu sendiri serta partisipasi masyarakat Kabupaten Tambrauw juga sudah dalam kategori baik dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama dalam PAD.

Derajat Desentralisasi

Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dinilai belum mampu dalam pengadaan Desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sittisaman, N. P. and A. (2019). Simulation Model and Scenario to Increase Corn Farmers' Profitabilit. *Advances in Computer Communication and Computational Sciences*, May, 437–446. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6861-5>
- Alvina, D., Amir, A., Yudi. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal*. Hal. 25-36. Universitas Jambi. <https://jurnal/5377Article%20Text-11405-1-10-20180807.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Cicilia V. S. E., Murni S., Engka D. M. (2019) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol.17. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal%20enci%20sri/10245-20402-1-SM.pdf>. Diakses 23 Januari 2020.
- Darise.Nurlan (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta:Indeks.
- Fajriansyah, Y., Elim, I., Walandouw, S.K. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. *Jurnal EMBA*. Vol.7, Hal. 4465-4474. Universitas Samratulangi Manado. <https://doi.org/10.25794/emba.v7i3.25146>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Gaffar. (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendawati, H., Komarasakti, D., Ansori S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5 | No.3 | 2017. Universitas Sangga Buana-YPKP. <https://jurnal/9229-19323-3-PB.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Horne. (2008). *Fundamental of Financial Management*. Twelfth Edition. Perentice: Hall International.

- Kaho. (2007). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, P. K., Hafni, N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal*. Volume 1. No. 1. Universitas Negeri Medan. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/download/815/603>. Diakses 13 Januari 2020.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Hal. 99. Yogyakarta: Andi.
- (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.2, Hal. 1521-1527. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/4914-9476-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Oktavianus, D., Murni, S., Saerang, I. S. (2015). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Bitung Dan Kota Tomohon Periode Anggaran 2010 – 2014. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.3, Hal.927-938. Universitas Samratulangi. <https://jurnal%20enci%20sri/9716-19337-1-SM.pdf>. Diakses 23 Januari 2020.
- Pandjaitan, F. P., Parengkuan, T., Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA*. Vol.6 No.3, Hal. 1398 – 1407. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/20224-42261-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Patompo, P. A., Untu, V. N. (2019). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016. *Jurnal EMBA*. Vol.7 No.4, Hal. 3159-3168. Universitas Samratulangi Manado. <https://doi.org//10.35794/emba.v7i3.24202>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Poyoh, C. M., Murni S., Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol No.2, Hal. 745-752. Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://jurnal%20enci%20sri/15958-32018-1-SM.pdf>. Diakses 23 Januari 2020.
- Sittisaman, N. P. and A. (2019). Simulation Model and Scenario to Increase Corn Farmers' Profitabilit. *Advances in Computer Communication and Computational Sciences*, May, 437–446. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6861-5>
- Rahmawati, A., Putra, I.W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010- 2012. *Jurnal*. Vol.15.3, Hal. 1767-1795. Universitas Udayana. <https://jurnal/17858-1->



- 41051-1-10-20160609.pdf. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 738 Vol.4 No.2, Hal. 738-747. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/13153-26256-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Suparmoko, M. (2002). Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. *Ekonomi Tambuwun*,
- E. L., Pangemanan, S.S., Afandi, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.4, Hal. 81-89. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/6220-12118-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Sittisaman, N. P. and A. (2019). Simulation Model and Scenario to Increase Corn Farmers' Profitabilit. *Advances in Computer Communication and Computational Sciences*, May, 437–446. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6861-5>
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahyudi, M., Wulandari, E. (2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Jurnal RAK*. Volume 2 Nomor 3. UNTIDAR Magelang. <https://jurnal/498-1011-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Wikipedia. (2019). “Profil Kota Bitung”. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Bitung&oldid=16399224. Diakses tanggal 14 Januari 2020, pukul 19.11 wita.
- Wulaningrum, R. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Politeknik Negeri Samarinda*. <https://jurnal/617-1301-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Sittisaman, N. P. and A. (2019). Simulation Model and Scenario to Increase Corn Farmers' Profitabilit. *Advances in Computer Communication and Computational Sciences*, May, 437–446. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6861-5>
- Setiawan, R., Pio, L., Cavaliere, L., Sankaran, D., Rani, K., Yapanto, L. M., Laskar, N. H., Raisal, I., Christabel, G. J. A., Setiawan, R., Petra, U. K., Airlangga, U., Pio, L., Cavaliere, L., & Foggia, U. (n.d.). Access to Financial Services and Women Empowerment , through Microfinance eligibility. 1, 841–859.
- Zuhri, M., Soleh, A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Jurnal Universitas Dehasen Bengkulu*.

<https://jurnal/55396-ID-analisis-kinerja-keuangan-pemerintah-dae.pdf>.
Diakses tanggal 13 Januari 2020